

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Banyuasin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan UU No.6 Tahun 2002. (www.wikipedia.org). Kabupaten Banyuasin merupakan daerah penyelenggara pertumbuhan Kota Palembang terutama untuk sektor industri dan sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan di kabupaten Banyuasin dibuktikan dengan terpilihnya kabupaten Banyuasin sebagai daerah penyangga lumbung pangan nasional oleh Kementrian Pertanian RI. (www.rmolsumsel.com).

Pemerintahan merupakan suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu negara yang memiliki cara dan sistem yang berbeda-beda dengan tujuan agar negara tersebut dapat tertata dengan baik. Organisasi sektor publik yang sering diidentifikasi dengan pemerintahan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan diberbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya. (www.gurupendidikan.com)

Untuk lebih mewujudkan *good public and corporate governance*, otonomi daerah dirasa perlu diterapkan demi memberikan kewenangan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pembagian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 18, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD merupakan semua pendapatan asli perekonomian dari suatu daerah, PAD setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh

lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah secara umum adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Priantara, 2013:535)

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berikut ini tabel target dan realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2015.

Tabel 1.1
Rekapitulasi target dan realisasi Pajak Daerah kabupaten Banyuasin (Rp)

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	%
2013	19.053.055.123,10	31.070.179.001,50	163%
2014	32.132.093.699,00	51.789.376.210,25	161%
2015	38.935.490.935,00	39.309.603.790,94	110%

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin

Tabel 1.2
Rekapitulasi target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Banyuasin (Rp)

Tahun	Target Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	%
2013	27.829.108.900,00	28.353.447.843,10	101%
2014	9.157.864.100,00	10.903.003.822,00	119%
2015	10.746.899.000,00	12.867.041.234,53	119%

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin

Dari tabel di atas dapat dilihat Perbedaan dan Perkembangannya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami fluktuasi dalam realisasinya, pada tahun 2014 Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp51.789.376.210,25 dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp31.070.179.001,50, dan Retribusi Daerah mengalami

penurunan sebesar Rp10.903.003.822,00 dari realisasi tahun 2013 yaitu Rp28.353.447.843,10. Sebaliknya tahun 2015 realisasi Pajak Daerah menurun dari Rp Rp51.789.376.210,25 menjadi Rp39.309.603.790,94 dan realisasi Retribusi Daerah naik dari Rp10.903.003.822,00 menjadi 12.867.041.234,53. Pajak Daerah mengalami kenaikan target setiap tahunnya dan Retribusi mengalami fluktuasi setiap tahunnya, namun keduanya tetap mencapai target lebih dari 100%

Tabel 1.3
Rekapitulasi realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwasin (Rp)

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%
2013	31.070.179.001,50	78.094.496.759,55	39,7%
2014	51.789.376.210,25	116.544.247.592,75	44,4%
2015	39.309.603.790,94	96.151.833.107,21	40,8%

Sumber: *Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Banyuwasin*

Tabel 1.4
Rekapitulasi realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwasin

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%
2013	28.353.447.843,10	78.094.496.759,55	36,3%
2014	10.903.003.822,00	116.544.247.592,75	9,3%
2015	12.867.041.234,53	96.151.833.107,21	13,3%

Sumber: *Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Banyuwasin*

Dilihat dari tabel rekapitulasi realisasi di atas Pajak Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah ditahun 2014 sebesar 44,4% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 dan rata-rata kontribusi Pajak Daerah selama 3 tahun sebesar 41,6% dari total Pendapatan Asli Daerah, Sedangkan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang sedikit terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah ditahun 2014 sebesar 9,3% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dan rata-rata kontribusi Retribusi Daerah selama 3 tahun 19,6% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa Penelitian terdahulu, Penelitian sebelumnya yang dilakukan Siregar (2015) terdapat pengaruh yang signifikan pada penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, pada penerimaan Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penelitian Fitriana (2014) menunjukkan

bahwa Retribusi Daerah lebih dominan berpengaruh terhadap PAD, namun secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2014) menyatakan penambahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

Penelitian yang dilakukan Kusuma dan Wirawati (2013) menyatakan bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan dilihat dari kontribusinya Pajak Daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan PAD. Sedangkan penelitian yang dilakukan Marpen (2013) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD.

Isroy, ddk (2013) Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, Sedangkan Otonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD. Penelitian yang dilakukan Utomo (2013) secara parsial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan Nugroho (2011) secara parsial Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kurniawan (2010) menyatakan dari uji statistik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap PAD.

Anggraini (2010) menyatakan hasil analisis regresi terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam peningkatan PAD. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fachiroh (2009) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap PAD.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam laporan ini, yaitu:

1. Bagaimana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Bagaimana Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan sehingga penulisan laporan akhir ini dapat dilakukan secara terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya dengan mengangkat Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.

2. Untuk mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
3. Untuk mengetahui variabel dominan yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan laporan akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis dalam penyusunan laporan akhir dan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi dan sebagai acuan bagi penulis seterusnya agar dapat terus dikembangkan.
2. Hasil penelitian dan pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan bukti mengenai besarnya Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, dimana tiap-tiap bab memiliki hubungan yang satu dengan yang lain untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan laporan akhir ini secara singkat yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis mengemukakan dasar serta permasalahan yang akan dibahas, yaitu latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini Penulis mengemukakan pendapat para ahli mengenai teori-teori pengertian pendapatan asli daerah, pengertian pajak daerah, jenis pajak daerah, pengertian retribusi daerah, jenis retribusi daerah, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi sampel yang digunakan dalam penelitian dan informasi data-data yang diperlukan dalam melakukan pengujian penelitian ini meliputi identifikasi dan definisi operasional variabel, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data, metode pengumpulan data, serta model dan teknik analisis yang digunakan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini dijelaskan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS versi 21 sebagai alat bantu dalam pengolahan data. Selain itu juga akan dijelaskan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini adalah bab terakhir dimana penulis memberikan kesimpulan dari isi pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan datang.